

Evaluasi Program Penyaluran Pupuk Bersubsidi Melalui Kartu Tani di Kecamatan Padang Sago, Kabupaten Padang Pariaman

¹Fatma Anisa, ²M. Fachri Adnan

¹Mahasiswa Sarjana Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang

²Dosen Sarjana Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang

Article Info	Abstract
<p>Article history: Received 30 Oktober 2021 Publish 10 November 2021</p> <hr/> <p>Keywords: Subsidized Fertilizer, Evaluation, Farmer Cards</p>	<p><i>This article is based on the problem of distributing subsidized fertilizers through farmer cards in Padang Sago District where it was found that subsidized fertilizer sales exceeded the Highest Retail Price, the internet network for electronic data capture machines was inadequate, electronic data capture machines often experienced errors and could not read farmer subsidized fertilizer allocations. , there is a sale of subsidized fertilizer not to farmers who propose farmer cards, and there is a misperception of farmers. The purpose of this study was to analyze the implementation of subsidized fertilizer distribution through farmer cards and to evaluate the implementation of subsidized fertilizer distribution through farmer cards in Padang Sago District, Padang Pariaman Regency. This research was conducted through a qualitative approach with a descriptive method. The data collection technique was done by purposive sampling. The location of the research was carried out in the Padang Sago District with data collection from this study, namely the Agricultural Extension Center, Padang Sago District. Data obtained from interviews and documentation studies. Test the validity of the data using source triangulation and data analysis techniques using manual data analysis procedures. The results showed that the implementation of the subsidized fertilizer distribution program through farmer cards in Padang Sago District, Padang Pariaman Regency had not run optimally. And the evaluation of the implementation of the distribution of subsidized fertilizers through farmer cards shows that the implementation has not been effective because not all of its objectives have been achieved and have not been on target, it is efficient despite the lack of resources but optimization has been carried out properly, has met the adequacy aspect, is evenly distributed because the benefits of the program are distributed to the target group. , has been responsive because the response of farmers and the apparatus has been good to this program and has been effective because farmers and apparatus feel the impact of the implementation of the program.</i></p>
<p>Info Artikel</p> <p>Article history: Diterima 30 Oktober 2021 Publis 10 November 2021</p>	<p>Abstrak</p> <p>Artikel ini berdasarakan masalah penyaluran pupuk bersubsidi melalui kartu tani di Kecamatan Padang Sago yang ditemukan adanya penjualan pupuk bersubsidi melebihi Harga Eceran Tertinggi, jaringan internet untuk mesin <i>electronic data capture</i> tidak memadai, mesin <i>electronic data capture</i> sering mengalami eror dan tidak bisa membaca alokasi pupuk subsidi petani, terjadi penjualan pupuk subsidi bukan kepada petani pengusul kartu tani, dan adanya kesalahan persepsi petani. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi melalui kartu tani dan evaluasi pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi melalui kartu tani di Kecamatan Padang Sago, Kabupaten Padang Pariaman. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengambilan data dilakukan secara <i>purposive sampling</i>. Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Padang Sago dengan pengambilan data dari penelitian ini yaitu di Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Padang Sago. Data diperoleh dari hasil wawancara dan studi dokumentasi. Uji keabsahan data menggunakan <i>triangulasi</i> sumber dan teknik analisis data menggunakan teknik <i>manual data analysis procedur</i>. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program penyaluran pupuk bersubsidi melalui kartu tani di Kecamatan Padang Sago,</p>

Kabupaten Padang Pariaman belum berjalan secara optimal. Dan evaluasi pelaksanaan program penyaluran pupuk bersubsidi melalui kartu tani menunjukkan pelaksanaannya belum efektif karena belum seluruh tujuannya tercapai dan belum tepat sasaran, sudah efisien meski kekurangan sumberdaya namun optimalisasi sudah dilakukan dengan baik, sudah memenuhi aspek kecukupan, sudah merata karena manfaat program didistribusikan kepada kelompok sasaran, sudah responsive karena tanggapan petani dan aparaturnya sudah baik terhadap program ini serta sudah tepat guna karena petani dan aparaturnya merasakan dampak dari pelaksanaan program tersebut.

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](#)



Corresponding Author:

Fatma Anisa

Mahasiswa Sarjana Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang

fatma.anisa14@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Penduduk Indonesia mayoritas bekerja di sektor pertanian. Dalam sektor pertanian, hal yang sangat penting adalah penggunaan pupuk. Pupuk merupakan komoditi yang memiliki peran strategis dalam mendukung sektor pertanian dan dalam upaya meningkatkan hasil produksi petani (Syah et al., 2015). Oleh karena itu, jika ketersediaan pupuk sedikit atau harga pupuk mahal, maka akan berpengaruh pada kualitas maupun kuantitas hasil pertanian. Namun, realitas yang seringkali ditemui oleh petani adalah terjadinya kelangkaan pupuk dan harga pupuk yang tinggi. Untuk itu, ketersediaan pupuk yang berkualitas dan terjangkau menjadi jaminan pemerintah.

Salah satu instrumen kebijakan yang ditempuh pemerintah adalah memberikan subsidi harga pada pupuk. Pemerintah telah menerapkan kebijakan pupuk bersubsidi sejak tahun 1970-an (Yuliati, 2015). Meski telah berkali-kali diperbarui, kebijakan pupuk bersubsidi belum mampu menjamin ketersediaan pupuk yang berkualitas dan terjangkau bagi petani. Hal tersebut terjadi karena banyaknya masalah terkait penyaluran pupuk bersubsidi.

Sebagai upaya memperbaiki penyaluran pupuk bersubsidi, pemerintah mengeluarkan program penyaluran pupuk bersubsidi melalui kartu tani. Program penyaluran pupuk bersubsidi melalui kartu tani ini digagas berdasarkan Peraturan Kementerian Pertanian Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2018.

Kartu Tani menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/SR.310/12/2017 Tentang Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi adalah kartu yang dikeluarkan oleh perbankan kepada petani untuk digunakan dalam transaksi pennebusan pupuk bersubsidi melalui mesin *electronic data capture* (EDC) di kios pengecer resmi. Program penyaluran pupuk bersubsidi melalui kartu tani bertujuan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani atau kelompok tani, terwujudnya distribusi pupuk bersubsidi yang sesuai dengan asas 6 (enam) tepat (tepat jumlah, jenis, waktu, tempat, mutu dan harga) dan meningkatkan pemberian layanan perbankan bagi petani untuk memperoleh akses pembiayaan dari perbankan.

Program penyaluran pupuk bersubsidi melalui kartu tani telah dilaksanakan di beberapa daerah di Indonesia. Namun pelaksanaannya masih belum optimal, misalnya di Jawa Tengah masih ada kartu tani yang tidak berfungsi karena keengganan masyarakat untuk menabung di bank BRI (Ashari & Hariani, 2018), kemudian di Jawa Timur masih ada beberapa petani mengaku belum merasakan manfaat yang didapatkan dari Kartu Tani yang diperolehnya (Mufidah & Prabawati, 2018) dan di Sumatera Utara pelayanan kartu tani yang diberikan belum optimal (Sihite, 2021).

Kecamatan Padang Sago merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman yang memiliki yang memiliki alokasi pupuk bersubsidi tertinggi se Kabupaten Padang

Pariaman di tahun 2021 pada jenis pupuk subsidi SP36 dan ZA. Hal ini tentunya menuntut tercapai penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga pupuk bersubsidi tersebut sampai ketangan petani.

Dalam pelaksanaan program penyaluran pupuk subsidi melalui kartu tani, Kecamatan Padang Sago memiliki jumlah petani paling sedikit se kabupaten Padang Pariaman yakni hanya 591 petani. Meski sedikit, seharusnya implementasi program penyaluran pupuk subsidi melalui kartu tani ini dapat terlaksana dengan maksimal.

Dalam pelaksanaan program penyaluran pupuk bersubsidi melalui kartu tani di Kecamatan Padang Sago nyatanya masih banyak permasalahan yang terjadi sehingga menjadikan Kecamatan Padang Sago sebagai Kecamatan terendah yang menggunakan kartu tani. Adapun permasalahannya seperti harga pupuk bersubsidi di kios pengecer dijual melebihi harga eceran tertinggi yang telah diatur pemerintah setiap tahunnya. Ini artinya petani membeli pupuk bersubsidi namun tidak diharga subsidi. Padahal subsidi merupakan kebijakan yang membuat harga beli input oleh petani lebih murah dibanding harga pasarnya dan subsidi pupuk diharapkan dapat melindungi petani, dapat meningkatkan produktivitas dan meningkatkan taraf ekonomi para petani (Ragimun et al., 2020).

Selain itu dalam penyaluran pupuk bersubsidi melalui kartu tani ini, penebusan pupuk subsidi di kios pengecer menggunakan mesin *electronic data capture*. Namun berdasarkan wawancara dengan petani, mesin *electronic data capture* yang tersedia di kios pengecer pupuk subsidi di Kecamatan Padang Sago masih sering mengalami eror dan bahkan tidak bisa membaca alokasi pupuk subsidi masing-masing petani. Ketersediaan jaringan internet untuk menggunakan mesin *electronic data capture* di Kecamatan Padang Sago juga kurang memadai.

Kemudian pada program penyaluran pupuk bersubsidi melalui kartu tani, pupuk subsidi seharusnya dijual kepada petani yang diusulkan mendapat kartu tani dan telah tercantum dalam E-RDKK. Namun di Kecamatan Padang Sago masih ditemukan penjualan pupuk subsidi selain kepada petani pengusul kartu tani.

Selanjutnya sosialisasi yang dilakukan oleh penyuluh pertanian petani di Kecamatan Padang Sago masih rendah sehingga menimbulkan kesalahan persepsi pada petani mengenai kegunaan kartu tani. Petani beranggapan bahwa kartu tani adalah kartu atm yang didalamnya sudah berisi saldo dari pemerintah untuk menebus pupuk subsidi sama halnya dengan kartu PKH. Oleh karena itu petani enggan melakukan mengisi saldo kartu taninya untuk menebus pupuk subsidi di kios pengecer.

Pupuk subsidi yang disalurkan melalui kartu tani seharusnya dijual di kios pengecer masing-masing nagari agar petani dengan mudah mengakses pupuk subsidi tersebut. Namun ketersediaan kios pengecer pupuk subsidi di Kecamatan Padang Sago masih tergolong sedikit dan tidak mampu menjangkau seluruh wilayah kecamatan. Hal ini membuat petani merasa terbebani oleh biaya transportasi yang lebih tinggi.

Adanya permasalahan yang terjadi di Kecamatan Padang Sago dalam pelaksanaan program penyaluran pupuk bersubsidi melalui kartu tani menyebabkan belum tercapainya tujuan program ini. Maka menjadi daya tarik peneliti untuk mengangkat penelitian dengan judul *Evaluasi Pelaksanaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Melalui Kartu Tani di Kecamatan Padang Sago, Kabupaten Padang Pariaman*.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Padang Sago, Kabupaten Padang Pariaman. Alasan peneliti melakukan penelitian di Kecamatan Padang Sago karena Kecamatan Padang Sago merupakan daerah yang paling sedikit melakukan transaksi kartu tani di Kabupaten Padang Pariaman. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.

Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposivesampling*. Adapun informan penelitian ini adalah Seksi Pupuk, Pestsida dan Alsintan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman, Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Padang Sago, Penyuluh Kecamatan Padang Sago, Pemilik Kios Pengecer Pupuk

Subsidi, Petani penerima kartu tani dan Petani tidak menerima kartu tani. Total informan mencapai 13 informan.

Teknik pengumpulan datanya menggunakan 1) Wawancara mendalam dimana peneliti mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan terkait pelaksanaan program penyaluran pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani 3) Studi dokumentasi dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan implementasi program penyaluran pupuk subsidi melalui kartu tani. Uji keabsahan data penulis menggunakan triangulasi sumber. Untuk analisis data, peneliti menggunakan *manual Data Analysis Procedur* (MDAP) yang secara teratur mengumpulkan data di lapangan, kemudian membuat catatan harian dan transkrip, melakukan *coding* terhadap data, lalu membuat tema dan kategorisasi hingga melahirkan memos (Bungin, 2017)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyaluran Pupuk Bersubsidi Melalui Kartu Tani

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran pupuk bersubsidi melalui kartu tani di Kecamatan Padang Sagodilaksanakan semenjak tahun 2019 dengan menggandeng Bank Mandiri sebagai Bank penerbit kartu tani dan penyedia mesin *electronic data capture* di dua kios pengecer pupuk bersubsidi.

Penyaluran pupuk bersubsidi melalui kartu tani di Kecamatan Padang Sago dilakukan dengan mekanisme yang pertama yaitu pengusulan kartu tani. Penyuluh pertanian menyuruh ketua kelompok tani untuk mengumpulkan KTP dan KK anggota kelompok tani yang menggarap lahan maksimal 2 Hektar. Data petani yang sudah diserahkan ke penyuluh pertanian diinput untuk penyusunan ERDCK dan pengusulan kartu tani. Di Kecamatan Padang Sago sejak tahun 2019, terdapat 567 petani yang diinput ke ERDCK dan diusulkan mendapat kartu tani.

Tabel 1. Data Petani dalam ERDCK di Kecamatan Padang Sago

No.	Nagari	Petani di ERDCK
1.	Koto Dalam	-
2.	Koto Dalam Barat	54
3.	Koto Dalam Selatan	94
4.	Batu Kalang	-
5.	Batu Kalang Utara	215
6.	Koto Baru	228
Jumlah		591

Sumber : Balai Penyuluhan Pertanian, Kecamatan Padang Sago

Data yang diinput ke ERDCK kemudian dilakukan verifikasi oleh koordinator Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Padang Sago, selanjutnyadilakukan konfirmasi ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman. Setelah dikonfirmasi oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman, data ERDCK diserahkan ke Bank Mandiri. Dan mekanisme selanjutnya, Bank Mandiri melakukan penerbitan kartu tani dan mendistribusikannya kepada petani. Di Kecamatan Padang Sago, belum seluruh petani di ERDCK yang mendapat kartu tani, dari 567 petani di ERDCK hanya 122 petani yang dapat kartu tani.

Setelah diterbitkan dan didistribusikan ke petani, mekanisme selanjutnya adalah penggunaan kartu tani. Di Kecamatan Padang Sago kartu tani belum sepenuhnya dapat digunakan dalam penebusan pupuk bersubsidi. Hal ini terjadi karena jaringan mesin *electronic data capture* yang digunakan untuk menggesek kartu tani di kios pengecer kurang tersedia. Selain itu mesin *electronic data capture* juga sering mengalami eror dan sama sekali tidak bisa membaca alokasi pupuk subsidi masing-masing petani. Dilain sisi, saldo kartu tani masing-masing petani kebanyakan juga belum diisi, karena banyak petani yang beranggapan bahwa kartu tani adalah kartu ATM yang sudah diisi saldo oleh pemerintah untuk menebus pupuk bersubsidi. Oleh karena itu, kios pengecer pupuk bersubsidi di Kecamatan Padang Sago menganjurkan petani untuk belum menggunakan kartu tani dalam menebus pupuk subsidi.

Menurut Horn (Tahir, 2014) implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan. Jika dikaitkan dengan penelitian ini, maka dapat dilihat bahwa implementasi penyaluran pupuk bersubsidi melalui kartu tani di Kecamatan Padang Sago belum optimal. Hal itu dapat dilihat dari mekanisme pelaksanaannya mulai dari pengusulan kartu tani, penerbitan kartu tani dan penggunaan kartu tani untuk penebusan pupuk subsidi di kios pengecer. Semua mekanisme tersebut sudah dijelaskan dan disampaikan oleh pihak Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Padang Sago. Namun belum semua mekanisme tersebut dapat dilaksanakan. Penerbitan kartu tani belum dilakukan untuk seluruh petani yang terdapat di ERDCK. Begitupun dengan penebusan pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani yang masih minim dilakukan. Padahal secara prinsip terdapat 2 bagian dalam pelaksanaan program penyaluran pupuk bersubsidi melalui kartu tani yaitu pemrosesan pencetakan Kartu Tani dan transaksi penebusan pupuk (Sriwinarti & Faesal, 2016).

Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu (Mufidah & Prabawati, 2018) bahwa implementasi program penyaluran pupuk bersubsidi di Desa Durung Bedug Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo sudah cukup baik namun belum bisa ditebus dengan menggunakan Kartu Tani karena beberapa kendala yang dihadapi.

Evaluasi Pelaksanaan Program Penyaluran Pupuk Bersubsidi Melalui Kartu Tani

1) Efektifitas

Untuk melihat efektifitas, dalam penelitian ini penulis menggunakan dua indikator yaitu pencapaian tujuan dan ketepatan sasaran.

a) Pencapaian Tujuan

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program penyaluran pupuk bersubsidi melalui kartu tani di Kecamatan Padang Sago, baru mampu mewujudkan tujuan program ini sebagian, yakni baru terwujudnya penyaluran pupuk subsidi secara tepat waktu, sebab semenjak adanya program ini kelangkaan pupuk sudah tidak terjadi lagi di Kecamatan Padang Sago. Selain itu penyaluran pupuk subsidi tepat jenis, jumlah dan mutu juga sudah terwujud. Selanjutnya pengawasan penyaluran pupuk subsidi juga sudah terwujud karena jatah pupuk untuk masing-masing petani yang telah ditebus terlihat dengan jelas serta penyelewengan yang dilakukan oleh kios pengecer sudah tidak terjadi lagi.

Sedangkan beberapa tujuan program penyaluran pupuk bersubsidi melalui kartu tani lainnya masih belum terealisasi di Kecamatan Padang Sago seperti mewujudkan penyaluran pupuk subsidi yang tepat harga.

Tabel 2. Perbandingan Harga HET dan Harga jual pupuk subsidi di Kecamatan Padang Sago

No.	Jenis Pupuk Bersubsidi	Harga Eceran Tertinggi	Harga Jual di Kios Pengecer Resmi
1.	Urea	Rp. 90.000	Rp. 135.000
2.	SP36	Rp. 100.000	Rp. 140.000
3.	ZA	Rp. 70.000	Rp. 120.000
4.	NPK	Rp. 115.000	Rp. 140.000
5.	Organik	Rp. 20.000	Rp. 40.000
6.	NPK Formula Khusus	Rp. 150.000	-

Sumber : Kios Pengecer Pupuk Subsidi di Kecamatan Padang Sago

Masih terjadi penjualan pupuk bersubsidi di Kecamatan Padang Sago yang jauh lebih tinggi dari harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan pemerintah, hal tersebut terjadi karena harga pupuk subsidi yang ditebus oleh kios pengecer ke distributor di lini III sudah lebih mahal dari harga eceran tertinggi karena biaya transportasi distributor ke kios yang tinggi. Padahal menurut Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian menyatakan bahwa “Pengecer wajib menjual pupuk bersubsidi kepada petani dan atau kelompok tani digudang lini IV berdasarkan RDCK dengan harga tidak melebihi HET ”. Hal ini ditekankan karena segala biaya yang

dibutuhkan dilini III, II dan I penyaluran pupuk subsidi sudah ditanggung oleh pemerintah. Pada saat transaksi penebusan pupuk subsidi menggunakan kartu tani terlihat jumlah jatah pupuk subsidi yang diambil petani, dan selanjutnya petani membayar sesuai HET (Gunawan & Pasaribu, 2020)

Hal ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Mufidah & Prabawati, 2018) yang mendapati bahwa penyaluran pupuk bersubsidi di Desa Durung Bedug telah memenuhi asas Tepat Harga karena tidak dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

Kemudian mewujudkan penyaluran pupuk bersubsidi tepat tempat juga belum terwujud, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada petani yang mengeluhkan jauhnya tempat untuk penebusan pupuk bersubsidi, sehingga meningkatkan lagi biaya angkut pupuk tersebut, padahal kios pupuk bersubsidi yang ada di nagari tersebut juga tersedia yang lebih dekat.

Menurut (Dunn, 2013) pencapaian tujuan adalah terwujudnya tujuan yang telah ditetapkan pada formulasi kebijakan. Jika dikaitkan dengan penelitian ini maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan program penyaluran pupuk bersubsidi melalui kartu tani di Kecamatan Padang Sago belum mencapai tujuan program tersebut. Tujuan program tersebut adalah terwujudnya distribusi pupuk bersubsidi yang sesuai dengan asas 6 (enam) tepat (tepat jumlah, jenis, waktu, tempat, mutu dan harga), dan meningkatkan pemberian layanan perbankan bagi petani untuk memperoleh akses pembiayaan dari perbankan. Sedangkan di Kecamatan Padang Sago, hanya sebagian tujuan tersebut yang sudah tercapai seperti distribusi pupuk bersubsidi sesuai dengan tepat jumlah, jenis, waktu dan mutu. Sedangkan distribusi pupuk bersubsidi sesuai dengan asas tepat harga, tepat tempat dan meningkatkan pemberian layanan perbankan bagi petani untuk memperoleh akses pembiayaan dari perbankan belum terwujud.

Hal ini juga didukung oleh hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Ashari & Hariani, 2018) yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program kartu tani di Kecamatan Banjarnegara belum efektif karena belum tercapainya tujuan secara menyeluruh.

b) Ketepatan Sasaran

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program penyaluran pupuk bersubsidi melalui kartu tani di Kecamatan Padang Sago belum tepat sasaran, hal ini terjadi karena ada petani yang tidak memenuhi sebagai kriteria penerima manfaat program ini seperti tidak mengusahakan lahan untuk bertani pada musim tanam namun tetap mendapatkan kartu tani dan dapat melakukan penebusan pupuk bersubsidi di kios pengecer.

Tepat sasaran menurut (Dunn, 2013) adalah pelaksanaan program mampu menyentuh seluruh kelompok sasaran yang telah ditetapkan pada formulasi kebijakan. Maka jika dikaitkan dengan penelitian ini, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan program penyaluran pupuk bersubsidi melalui kartu tani di Kecamatan Padang Sago belum tepat sasaran, karena beberapa petani yang dapat pupuk subsidi dan kartu tani tidak mengusahakan lahan untuk bertani pada musim tanam. Padahal sasaran program penyaluran pupuk bersubsidi melalui kartu tani ini adalah petani yang tergabung dalam Kelompok Tani dan telah diusulkan untuk memperoleh pupuk bersubsidi melalui Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang telah disahkan oleh Kepala Desa/Lurah dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, mempunyai KTP / NIK dan mengusahakan lahan untuk kegiatan bertani setiap musim tanam dengan luasan maksimal 2 (dua) hektar. Seharusnya pelaksanaan program yang dapat dikatakan tepat sasaran adalah

Maka dari dua indikator tersebut dapat dikatakan bahwa efektifitas dalam pelaksanaan program penyaluran pupuk bersubsidi melalui kartu tani di Kecamatan Padang Sago belum tercapai. Karena efektivitas tercapai apabila suatu kebijakan yang

telah dikeluarkan pemerintah tepat pada sasaran dan tujuan yang diinginkan (Nasution & Sujianto, 2017)

Hal ini tidak sejalan dengan hasil penelitian terdahulu (Siti Asyiah et al., 2017) bahwa tujuan kebijakan sudah dicapai, sehingga implementasi kebijakan pendidikan gratis di Kabupaten Pasaman sudah efektif.

2) Efisien

Untuk melihat kriteria efisien, dalam penelitian ini penulis menggunakan dua indikator yaitu sumberdaya dan optimalisasi.

a) Sumberdaya

Bersasarkan hasil penelitian, sumberdaya dalam pelaksanaan program penyaluran pupuk bersubsidi melalui kartu tani belum mencukupi. Sumberdaya manusia dalam pelaksanaan program penyaluran pupuk bersubsidi melalui kartu tani dapat dilihat dari organisasi pelaksanaanya yaitu Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Padang Sago, Bank Mandiri KCP Lubuk Alung dan Kios Pengecer pupuk subsidi di Kecamatan Padang Sago.

Sumberdaya manusia pada Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Padang Sago terdiri dari tiga orang penyuluh pertanian yang menaungi enam nagari.

Tabel 3. Data Penyuluh Pertanian di Kecamatan Padang Sago

No.	Penyuluh	Wilayah Kerja
1.	Wattini, SP	Batu Kalang Batu Kalang Utara
2.	Suhelmi	Koto Baru Koto Dalam Barat
3.	Fitri Ramadhani, SP	Koto Dalam Koto Dalam Selatan

Sumber : Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Padang Sago

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa sumberdaya manusia Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Padang Sago belum mencukupi dari segi jumlah, sebab untuk enam nagari wilayah kerja hanya terdapat tiga penyuluh pertanian. Namun secara kualitas, sumberdaya manusia Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Padang Sago telah mencukupi.

Tabel 4. Data Penyuluh Pertanian di Kecamatan Padang Sago

Pendidikan Terakhir	Jumlah
S1	2
SLTA	1

Sumber : Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Padang Sago

Dari tiga penyuluh pertanian di Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Padang Sago, dua diantaranya memiliki latar belakang pendidikan Strata 1 yang secara kualitas mampu melaksanakan program penyaluran pupuk bersubsidi melalui kartu tani secara baik.

Bank Mandiri KCP Lubuk Alung bertugas untuk menerbitkan kartu tani tidak hanya untuk kecamatan Padang Sago namun seluruh wilayah Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman. Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan Bank Mandiri KCP Lubuk Alung yang menangani penerbitan kartu tani hanya empat karyawan. Hal ini menandakan secara jumlah, sumberdaya manusia Bank Mandiri KCP Lubuk Alung tidak mencukupi dalam penerbitan kartu tani.

Kios pengecer pupuk subsidi bertanggung jawab melakukan penjualan pupuk subsidi kepada petani dengan media kartu tani yang digesekkan ke mesin EDC yang telah tersedia dikios tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumberdaya kios pengecer pupuk subsidi di Kecamatan Padang Sago beum mencukupi.

Tabel 5. Data kios pengecer pupuk subsidi di Kecamatan Padang Sago

SDM	Kios	Umur	Pendidikan
Daharmi	UD. Sumber Makmur	70	SLTA
Akmal	UD. Aksi Tani	28	S1

Sumber : Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Padang Sago

Data tersebut menunjukkan bahwa secara jumlah sumberdaya manusia kios pengecer pupuk subsidi di Kecamatan Padang Sago belum mencukupi, hanya terdapat dua orang sumberdaya manusia yang melayani penebusan pupuk subsidi untuk 576 petani. Begitupun dengan kualitas, dari dua pemilik kios pupuk subsidi di Kecamatan Padang Sago satu diantaranya sudah memiliki usia yang cukup tua, padahal pelaksanaan program penyaluran pupuk bersubsidi melalui kartu tani membutuhkan sumberdaya manusia yang cakap akan penggunaan teknologi seperti pengoperasian mesin EDC di kios pengecer pupuk subsidi.

Sumberdaya anggaran dalam pelaksanaan program penyaluran pupuk bersubsidi melalui kartu tani di kecamatan Padang Sago belum mencukupi. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyuluh pertanian Kecamatan Padang Sago menunjukkan bahwa anggaran pelaksanaannya hanya bersumber pada APBN dan belum ada alokasi dari APBD.

Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Ashari & Hariani, 2018) yang menemukan bahwa sumber daya yakni anggaran program penyaluran pupuk subsidi melalui kartu tani, dapat diketahui bahwa tidak adanya anggaran khusus untuk Kartu Tani menjadi faktor penghambat terwujudnya program kartu tani.

Sumberdaya peralatan dalam pelaksanaan program penyaluran pupuk bersubsidi melalui kartu tani di Kecamatan Padang Sago terdiri dari kartu tani dan mesin electronic data capture (EDC). Berdasarkan hasil penelitian di lapangan menunjukkan sumberdaya peralatan berupa kartu tani di Kecamatan Padang Sago belum tersedia untuk seluruh petani yang mendapatkan pupuk subsidi. Dari 567 petani penerima pupuk subsidi, hanya 122 petani yang mendapatkank kartu tani untuk menebus pupuk bersubsidi di kios pengecer pupuk subsidi di Kecamatan Padang sago.

Sumberdaya peralatan berupa mesin EDC sudah tersedia di kedua kios pengecer pupuk subsidi di Kecamatan Padang Sago, namun dari hasil wawancara dengan pemilik kios pengecer pupuk subsidi di Kecamatan Padang Sago, mesin EDC yang telah disediakan masih belum sepenuhnya dapat digunakan untuk penebusan pupuk subsidi karena mesin EDC sering mengalami eror dan tidak dapat melihat dan mengurangi jatah pupuk subsidi masing-masing petani.

Sumberdaya menurut Edward dalam (Mulyadi, 2015) adalah faktor penting dalam implementasi kebijakan agar efektif. Sumberdaya akan memberikan dampak pada kemampuan dan motivasi pelaksana kebijakan maupun kepada kelompok sasaran untuk memberikan apresiasi positif terhadap program (Wahid, Gayatri & Prayoga, 2021). Jika dikaitkan dengan penelitian ini, maka sumberdaya yang diperlukan adalah sumberdaya manusia, anggaran dan peralatan. Baik sumberdaya manusia, anggaran dan peralata masih belum mencukupi untuk pelaksanaan program penyaluran pupuk bersubsidi melalui kartu tani di Kecamatan Padang Sago.

Hal diatas sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Mufidah & Prabawati, 2018) fasilitas yang menunjang pelaksanaan program penyaluran pupuk bersubsidi melalui Kartu Tani belum memadai di Kecamatan Candi.

b) Optimalisasi

Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Padang Sago menunjukkan bahwa usaha untuk mengoptimalkan pelaksanaan program penyaluran pupuk bersubsidi melalui kartu tani di Kecamatan Padang Sago telah dilakukan oleh penyuluh kecamatan Padang Sago seperti upaya sosialisasi ke kelompok tani dan menanyakan solusi masalah kartu tani

yang tidak terbaca oleh mesin EDC di kios pengecer ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman serta ke Bank Mandiri.

Menurut (Pebratama et al., 2019) jumlah usaha yang dilakukan pelaksana program sangat dibutuhkan dalam mengoptimalkan pelaksanaan program (Pebratama et al., 2019). Jika usaha mencapai tujuan program tidak tersedia maka pelaksanaan program tidak dapat dicapai. Maka berdasarkan hasil penelitian dari dua indikator efisien yakni sumberdaya dan optimalisasi dapat dikatakan bahwa pelaksanaan program penyaluran pupuk bersubsidi melalui kartu tani di Kecamatan Padang Sago belum efisien, sebab meski telah dilakukan usaha optimalisasi pelaksanaan program tetapi dari segi sumberdaya masih tidak mencukupi sehingga tidak terciptanya efektifitas.

Tidak terdapat kesamaan hasil penelitian penulis dengan hasil penelitian terdahulu (Asyiah, Adnan, & Mubarak, 2017) bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman No.2 Tahun 2013 tentang pendidikan gratis sudah efisien, jumlah dana atau anggaran pendidikan gratis sudah cukup optimal untuk mendukung pelaksanaan pendidikan di sekolah. Kekurangan terjadi pada pelaksanaan kegiatan pengembangan siswa dan sekolah.

3) Kecukupan

Untuk melihat kriteria kecukupan, dalam penelitian ini penulis menggunakan dua indikator yaitu kepuasan masyarakat dan kinerja aparatur.

a) Kepuasan masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian pada pelaksanaan program penyaluran pupuk bersubsidi melalui kartu tani di kecamatan Padang Sago menunjukkan bahwa petani belum merasa puas dengan pelaksanaan program penyaluran pupuk bersubsidi melalui kartu tani di Kecamatan Padang Sago. Hal ini terjadi karena masih banyak masalah yang terjadi seperti harga pupuk subsidi yang belum tepat HET, petani bukan penerima kartu tani tetapi masih bisa membeli pupuk subsidi, mesin EDC yang masih eror, kartu tani yang tidak bisa digesekkan bahkan petani belum merasakan fungsi dan kegunaan program penyaluran pupuk bersubsidi melalui kartu tani ini.

Menurut (Eka, 2013)kepuasan masyarakat adalah respon, evaluasi dan tingkat emosi masyarakat terhadap pelayanan publik yang telah dinikmati pada tingkat hasil (*outcome*) sama atau melewati batas penilaian persepsi masyarakat. Jika dikaitkan dengan penelitian ini maka pelaksanaan program penyaluran pupuk bersubsidi melalui kartu tani di Kecamatan Padang Sago, petani belum merasa puas terhadap pelaksanaan program tersebut karena belum merasakan fungsi dan kegunaan program penyaluran pupuk bersubsidi melalui kartu tani.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian (Gunawan & Pasaribu, 2020) bahwa kepuasan petani belum baik, karena penebusan pupuk masih dilakukan secara manual dikarenakan beberapa kartu tani masih belum aktif, mesin EDC belum bisa membaca alokasi pupuk bersubsidi, serta gangguan sinyal di beberapa lokasi.

b) Kinerja Aparatur

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa kinerja aparatur sudah bagus, hal ini karena penyuluh Padang Sago berupaya agar pelaksanaan program penyaluran pupuk bersubsidi melalui kartu tani berjalan lancar. Selain itu penyuluh di Kecamatan Padang Sago juga aktif mencari solusi terkait masalah pelaksanaan program tersebut ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman. Namun dari segi pengawasan dalam penyaluran pupuk bersubsidi belum terlihat karena penyuluh hanya menerima laporan dari kios pengecer pupuk subsidi saja.

Menurut (Eka, 2013) kinerja aparatur adalah suatu hasil kerja yang dicapai seorang aparatur publik dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu. Jika dikaitkan dengan pelaksanaan program penyaluran pupuk bersubsidi melalui kartu tani di Kecamatan Padang Sago dapat dikatakan bahwa kinerja aparatur sudah optimal, penyuluh pertanian di

Kecamatan Padang Sago sudah berupaya agar pelaksanaan program penyaluran pupuk bersubsidi melalui kartu tani berjalan lancar.

Dari kedua indikator tersebut dapat dikatakan bahwa pelaksanaan program penyaluran pupuk bersubsidi melalui kartu tani di Kecamatan Padang Sago belum memenuhi kriteria kecukupan. Menurut (Dunn, 2013) kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Di Kecamatan Padang Sago, meski kinerja aparatur telah baik, namun kepuasan petani terhadap pelaksanaan program penyaluran pupuk bersubsidi melalui kartu tani masih belum terwujud, hal ini terjadi karena masih banyak masalah yang terjadi seperti harga pupuk subsidi yang belum tepat HET, petani bukan penerima kartu tani tetapi masih bisa membeli pupuk subsidi, mesin EDC yang masih eror, kartu tani yang tidak bisa digesekkan bahkan petani belum merasakan fungsi dan kegunaan kartu tani itu sendiri.

Hal ini tidak sejalan dengan dengan hasil penelitian terdahulu (Winarta, Raka & Sumada, 2020) bahwa kecukupan kebijakan Dana Bansos di Kabupaten Gianyar dalam mengatasi masalah pokok yang dihadapi masyarakat sudah cukup tepat, hal ini karena masyarakat merasa terbantu dan kebijakan ini tepat untuk mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka.

4) Pemerataan

Untuk melihat pemerataan, dalam penelitian ini penulis menggunakan indikator pencapaian sasaran dan transparansi.

a) Pencapaian Sasaran

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pencapaian sasarannya belum tercapai. Diketahui bahwa sasaran program ini adalah petani yang tergabung ke dalam kelompok tani dan telah diusulkan untuk memperoleh pupuk bersubsidi melalui Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), memiliki KTP dan KK serta mengusahakan lahan pertanian maksimal 2 hektar. Namun yang terjadi dilapangan, dari 567 petani di ERDKK dan telah diusulkan mendapat kartu tani, hanya 122 petani di Kecamatan Padang Sago yang baru mendapatkan kartu tani. Sedangkan untuk penggunaan kartu tani dalam penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Padang Sago sama saja, boleh digunakan boleh juga tidak digunakan asal menunjukkan KTP ke kios pengecer. Jadi tidak ada perbedaan antara petani yang sudah dapat kartu tani dengan petani yang belum mendapat kartu tani dalam penyaluran pupuk subsidi.

Menurut Branch dalam (Eka, 2013) pencapaian sasaran adalah pernyataan tentang kehendak yang sudah diidentifikasi, dianalisis, dan diekspresikan secara spesifik untuk menunjukkan bagaimana hal itu dapat dicapai dalam waktu dan sumberdaya yang tersedia. Jika dikaitkan dengan penelitian ini, maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan program penyaluran pupuk bersubsidi melalui kartu tani di Kecamatan Padang Sago sudah mencapai sasaran, baik petani yang sudah mendapat kartu tani maupun petani yang diusulkan mendapat kartu tani sama-sama mendapat manfaat dari pelaksanaan program penyaluran pupuk bersubsidi melalui kartu tani.

Hal ini sejalan dengan penelitian (Siti Asyiah et al., 2017) bahwa pelaksanaan pendidikan gratis diselenggarakan dengan merata tanpa membedakan siswa berdasarkan status ekonomi ataupun hal lainnya maka dari itu dapat disimpulkan pemerataan berkaitan dengan keadilan yang diberikan oleh pelaksana kepada sasaran kebijakan.

b) Transparansi

Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Padang Sago menunjukkan bahwa transparansi belum terwujud dalam penyaluran pupuk subsidi menggunakan kartu tani. Sebab meski data yang di input oleh penyuluh pertanian sesuai dengan data yang diberikan petani, tetapi pada saat penyalurannya masih belum transparan seperti tidak memberitahu petani berapa jatah pupuk subsidi dan harga pupuk dimasing-masing kios pengecer pupuk subsidi dikecamatan Padang Sago berbeda, padahal masih dalam

satu Kecamatan dan tidak dijelaskan juga secara terbuka terkait ketimpangan harga tersebut ke petani.

Tabel 4. Perbandingan Harga Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Padang Sago

Jenis Pupuk	Harga di Kios Pengecer (Per 50 Kg)	
	UD Sumber Makmur	UD Aksi Tani
Urea	Rp. 140.000	Rp. 135.000
SP36	Rp. 140.000	Rp. 135.000
ZA	Rp. 120.000	Rp. 90.000
NPK	Rp. 140.000	Rp. 130.000
Organik	Rp. 40.000	Rp. 40.000
NPK Formula Khusus	-	-

Sumber: *Kios Pengecer Pupuk Subsidi di Kecamatan Padang Sago.*

Menurut (Eka, 2013) transparansi adalah memberikan informasi yang terbuka dan jujur kepada masyarakat. Jika dikaitkan dengan penelitian ini maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan program penyaluran pupuk bersubsidi melalui kartu tani di Kecamatan Padang Sago belum memenuhi indikator transparansi. Sebab masih terjadi penutupan informasi terkait jatah pupuk subsidi masing-masing petani dan harga pupuk dimasing-masing kios pengecer pupuk subsidi dikecamatan Padang Sago berbeda.

Dari dua indikator yang digunakan untuk mengetahui kriteria pemerataan yaitu pencapaian sasaran dan transparansi, maka pelaksanaan program penyaluran pupuk bersubsidi melalui kartu tani di Kecamatan Padang Sago sudah cukup merata. Menurut (Dunn, 2013) pemerataan berkenaan dengan rasionalitas legal dan social dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antar kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Pelaksanaan program penyaluran pupuk bersubsidi melalui kartu tani di Kecamatan Padang Sago sudah merata, sebab manfaat program tersebut sudah dirasakan baik oleh petani penerima kartu tani maupun petani yang baru diusulkan menerima kartu tani.

Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian terdahulu (Winarta, Raka & Sumanda, 2020) bahwa pemerataan biaya dan manfaat yang didistribusikan kepada masyarakat di Kabupaten Gianyar sama. Dan untuk besaran biaya dan manfaat yang di distribusikan itu sama rata untuk semua lapisan masyarakat di Kabupaten Gianyar, masyarakat hanya perlu memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

5) Responsifitas

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan respon petani respon aparatur untuk mengetahui kriteria responsifitas.

a) Respon petani

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggapan petani terhadap program ini baik jika sesuai dengan aturan, karena pupuknya akan terjamin dan transparan. Tetapi untuk pelaksanaannya di Kecamatan Padang Sago masih belum sesuai aturan dan terlihat seperti hanya kerja sama pemerintah dengan Bank Mandiri untuk menambah nasabah. Ini artinya petani menganggap pelaksanaan program ini masih belum menguntungkan petani.

Menurut (Eka, 2013) respon masyarakat merupakan tanggapan masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan. Jika dikaitkan penelitian ini, maka respon petani terhadap pelaksanaan program penyaluran pupuk bersubsidi melalui kartu tani di Kecamatan Padang Sago sudah baik, hal itu dapat dilihat dari harapan petani terhadap program tersebut

b) Respon Aparatur

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa respon aparatur baik penyuluh pertanian maupun pemilik kios pengecer pupuk subsidi di Kecamatan Padang Sago program penyaluran pupuk bersubsidi melalui kartu tani bagus, namun untuk pelaksanaannya masih belum sesuai karena baik itu pelaksanaan dan administrasinya masih harus dibenahi supaya lebih bagus.

Menurut (Eka, 2013) respon aparatur adalah tanggapan yang muncul dai aparatur sebagai pelaksana kebijakan. Jika dikaitkan dnegan penelitian ini, maka dapat dikatakan bahwa tanggapan aparatur terhadap pelaksanaan program ini sudah baik, namun aparatur seperti penyuluh pertanian dan kios pengecer pupuk subsidi di Kecamatan Padang Sago berharap harus diperbaiki lagi pelaksanaan dan administrasi program ini.

Dari kedua indikator tersebut maka dapat dikatakan bahwa responsifitas pelaksanaan program penyaluran pupuk bersubsidi melalui kartu tani di Kecamatan Padang Sago sudah cukup baik. Menurut (Dunn, 2013) responsifitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Baik dari petani maupun aparatur pada dasarnya responnya terhadap pelaksanaan program ini sudah baik, hal itu dapat dilihat dari dukungan dan harapan baik petani maupun aparatur seperti penyuluh pertanian dan kios pengecer pupuk subsidi terhadap program ini.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu (Siti Asyiah et al., 2017) bahwa responsivitas cukup baik dalam implementasi kebijakan. Hal ini dapat dilihat dari adanya dukungan dan harapan dari masyarakat sasaran terhadap pelaksanaan kebijakan.

6) Ketepatangunaan

Untuk mengetahui kriteria ketepatangunaan, dalam penelitian ini penulis menggunakan dua indikator yaitu dampak bagi petani dan dampak bagi aparatur.

a) Dampak bagi petani

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa petani sudah merasakan dampak dari pelaksanaan program penyaluran pupuk bersubsidi melalui kartu tani di Kecamatan Padang Sago. Sejak dilaksanakannya program ini petani sudah tidak merasakan lagi terjadinya kelangkaan pupuk bersubsidi dan yang mendapat pupuk bersubsidipun sudah jelas.

Menurut (Eka, 2013) dampak bagi masyarakat adalah suatu akibat yang muncul setelah adanya implementasi kebijakan yang dirasakan oleh masyarakat sebagai penerima manfaat kebijakan. Jika dikaitkan dengan penelitian ini maka yang dilihat adalah dampak bagi petani, maka dapat dikatakan bahwa dampak bagi petani dengan adanya pelaksanaan program penyaluran pupuk bersubsidi melalui kartu tani sudah merasakan dampaknya. Sejak pelaksanaan program ini, sudah tidak terjadi lagi kelangkaan pupuk subsidi dan data penerima pupuk subsidipun sudah jauh lebih jelas.

b) Dampak bagi aparatur

Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Padang Sago menunjukkan bahwa aparatur baik penyuluh pertanian maupun kios pengecer pupuk subsidi di Kecamatan Padang Sago telah merasakan dampak pelaksanaan program ini. Penyuluh pertanian di Kecamatan Padang Sago merasa semenjak adanya program penyaluran pupuk bersubsidi melalui kartu tani kerjanya menjadi lebih mudah, karena data penyaluran pupuk bersubsidi menjadi lebih terintegrasi, pengawasannya mudah serta keluhan petani ke aparatur menjadi berkurang. Begitupun dengan kios pengecer pupuk subsidi di kecamatan Padang Sago, meskipun penggunaan kartu tani belum sempurna, tetapi dampaknya terlihat dari data petani yang jauh lebih jelas, kuota pupuk masing-masing petanipun jelas serta penyalurannya jadi lebih bagus, pekerjaan pemilik kiospun menjadi lebih mudah serta pelaporan penyaluran pupuk bersubsidi ke Balai Penyuluhan Pertanian menjadi lebih mudah.

Menurut (Eka, 2013) dampak bagi aparatur adalah suatu akibat yang dirasakan oleh aparatur sebagai pelaksana kebijakan. Jika dikaitkan dengan penelitian ini, maka dapat dikatan bahwa pelaksanaan program penyaluran pupuk bersubsidi melalui kartu tani di Kecamatan Padang Sago sudah berdampak bagi aparatur baik penyuluh pertanian dan kios pengecer pupuk subsidi.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Ashari & Hariani, 2018) bahwa pelaksanaan kartu tani sudah berdampak, bagi pemerintah

memudahkan dalam mendapatkan data pertanian yang lebih akurat serta bagi penjual pupuk adalah memudahkan pelayanan karena telah sesuai dengan kuota yang ada.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa : 1) Implementasi program penyaluran pupuk bersubsidi melalui kartu tani di Kecamatan Padang Sago belum berjalan secara optimal, karena penebusan pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani masih belum sepenuhnya dilakukan. 2) Hasil dari evaluasi pelaksanaan program penyaluran pupuk bersubsidi melalui kartu tani di kecamatan Padang Sago berdasarkan enam kriteria evaluasi menunjukkan bahwa perlu dilakukannya perbaikan. Dari kriteria efektifitas pelaksanaan program ini masih belum efektif, sebab belum seluruh tujuan dari program ini terwujud seperti penyaluran pupuk subsidi masih belum tepat harga dan tepat tempat serta belum tepat sasaran. Untuk kriteria efisiensi juga belum optimal, meski sudah ada upaya optimalisasi yang dilakukan penyuluh pertanian namun dari segi sumberdaya kurang mencukupi. Selanjutnya dari kriteria kecukupan masih belum optimal juga, karena belum mampu mengatasi seluruh masalah penyaluran pupuk bersubsidi, hal ini dapat dilihat dari rendahnya kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan program ini, tetapi secara kinerja aparatur pelaksana sudah baik meskipun dari segi pengawasannya masih kurang. Selanjutnya kriteria pemerataan, pelaksanaan program telah memenuhi kriteria pemerataan sebab baik petani yang sudah mendapat kartu tani maupun petani yang baru mengusulkan kartu tani sama-sama memperoleh akses penyaluran pupuk bersubsidi. Kemudian kriteria responsiveness menunjukkan bahwa pelaksanaan program sudah responsiveness, hal ini dapat dilihat dari baiknya dukungan dan harapan petani dan aparatur terhadap program ini. Dan yang terakhir yaitu kriteria ketepatangunaan, pelaksanaan program ini telah tepatguna baik bagi petani sebagai kelompok sasaran maupun aparatur sebagai kelompok pelaksana. Hal itu dapat dilihat dari dampak yang dirasakan oleh petani dan aparatur baik penyuluh pertanian maupun kios pengecer pupuk subsidi di Kecamatan Padang Sago.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian terkait evaluasi pelaksanaan program penyaluran pupuk bersubsidi melalui kartu tani di Kecamatan Padang Sago, penulis mencoba memberikan saran untuk pelaksanaan program penyaluran pupuk bersubsidi melalui kartu tani untuk selanjutnya yaitu :

1. Meningkatkan sosialisasi yang bersifat berkelanjutan terkait program penyaluran pupuk bersubsidi melalui kartu tani ke petani dan menekankan bahwa kartu tani bukan penyaluran bantuan non tunai dari pemerintah.
2. Mewujudkan kecukupan sumberdaya dalam pelaksanaan program penyaluran pupuk bersubsidi melalui kartu tani baik sumberdaya manusia, anggaran dan peralatan.
3. Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan program penyaluran pupuk bersubsidi melalui kartu tani guna mewujudkan penyaluran pupuk subsidi yang tepat harga, jumlah, mutu, jenis, waktu dan tempat serta transparan.
4. Meningkatkan pendataan yang akurat terhadap pupuk subsidi yang dibutuhkan petani guna mengurangi penjualan pupuk subsidi kepada selain petani yang memenuhi syarat sebagai penerima pupuk subsidi.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Ashari, M. L., & Hariani, D. (2018). Analisis Efektivitas Program Kartu Tani di Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara. *Jurnal Adminitansi Publik*, 53(9), 1689–1699.
- Burhan Bungin. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Raja Grafindo.
- Eka Putri Silvia. (2013). *Evaluasi Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung*.
- Gunawan, E., & Pasaribu, S. (2020). Persepsi Petani dalam Impelentasi Program Kartu Tani untuk Mendukung Distribusi Pupuk Bersubsidi. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*,

28(2), 55–68.

- Mufidah, N., & Prabawati, I. (2018). Implementasi Program Penyaluran Pupuk Bersubsidi Melalui Kartu Tani Di Desa Durung Bedug Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Mahasiswa*, 6(9), 1–8.
- Mulyadi, D. (2015). *Studi Kebijakan Publik, dan Pelayanan Publik*. Alfabeta.
- Nasution, I., & Sujianto. (2017). *Evaluasi Implementasi Kebijakan tentang Tartanan Kebandarudaraan Nasional (Studi Pada Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II)*. 4(2), 1–13.
- Pebratama, R., Adnan, M. F., & Mubarak, A. (2019). Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Santunan Kematian Berdasarkan Perwako Padang No,or 15 Tahun 2015. *Journal of Education on Social Science*, 3(2), 156–166.
- Ragimun, Makmun, & Setiawan, S. (2020). Stategi Penyaluran Pupuk di Indonesia. *Jurnal Ilmiah M-Progress*, 10(1).
- Sihite, B. (2021). *Implementasi Program Kartu Tani dalam Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi*.
- Siti Asyiah, Adnan, M. F., & Mubarak, A. (2017). Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis di Kabupaten Pasaman. *Journal of Public Sector Innovations*, 2(1), 1–9.
- Syah, K., Wasiaty, I., & Makmur, M. H. (2015). Pelaksanaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Desa Ajung Kecamatan Ajung. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara Universitas Jember*, 1(1), 1–14.
- Tahir, A. (2014). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Alfabeta.
- William Dunn. (2013). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. UGM Press.
- Yuliati, F. (2015). Efektifitas Implementasi Kebijakan Pupuk Subsidi Pada Tanaman Pangan di kabupaten Rokan Hilir. *Spirit Publik*, 10(April), 133–163.